



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Maret 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
**UNIT KERJA** : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **AGUS FATONI**
2. Jabatan : **KEPALA BADAN**
3. NHK : **262342**

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 3.641.200.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 380 m2/72 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 215 m2/201 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 2.750.000.000
3. Tanah Seluas 240 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 36.000.000
4. Bangunan Seluas 20 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 650 m2/400 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 365.000.000
6. Tanah Seluas 980 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
7. Tanah Seluas 214 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 32.100.000
8. Tanah Seluas 254 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 38.100.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp. 92.650.000**

1. MOBIL, TOYOTA RUSH MINIBUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 79.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 7.800.000



3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI  
Rp. 5.850.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	379.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.973.942.558
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	6.087.292.558
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	6.087.292.558

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.